

# RENCANA KERJA TAHUN 2022

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,  
KELUARGA BERENCANA DAN  
PERLINDUNGAN ANAK

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK



USER  
[Type the company name]  
[Pick the date]





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri atas 6 (enam) tahap yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum PD/lintas PD, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

PD menyusun rancangan awal Renja PD dengan berpedoman pada Renstra PD, hasil evaluasi hasil Renja PD tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah PD untuk menyusun Renja PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak disusun berdasarkan Kota Pontianak, Renstra DP2KBP3A Kota Pontianak, serta berpedoman pada Renja dan Lembaga terkait urusan yang diemban oleh (DP2KBP3A) Kota Pontianak.

Proses penyusunan Renja DP2KBP3A Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 didasarkan pada Renstra (DP2KBP3A) Kota Pontianak 2020-2024 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2022. Tahun 2022 merupakan tahun ke-3 perencanaan pembangunan Kota Pontianak yang berpedoman pada RPJMD 2020-2024. Sesuai dengan tugas dan fungsi DP2KBP3A Kota Pontianak serta sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah daerah tahun

2020-2024 yaitu "Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat".

Selanjutnya Renja PD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja OPD adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan DaerahProvinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Rencana Pembangunan;
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
  25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10);
  26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3);
  27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023;
  28. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
  29. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2);
  30. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 (Nomor 49).

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### 1. Maksud

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam PD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

#### 2. Tujuan

- a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
- b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan perangkat daerah;
- c. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
- d. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V. Penutup



## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun

**E**valuasi dan analisa capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah - langkah pemecahan masalah yang diambil Instansi Pemerintah Kota Pontianak dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing - masing indikator kinerja sasaran (*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada Renja OPD tahun lalu (tahun 2020).

Renja 2020 merupakan tahun pertama dari periode RPJM 2020 – 2024, yang masih menggunakan indikator dan nomenklatur yang belum dimutakhirkan sesuai dengan Permendagri No 90 Tahun 2019. Untuk itu, capaian renja pada tahun 2020 akan memiliki perbedaan nomenklatur dan sebagian indikator kerjanya dengan usulan Renja 2022, dikarenakan Renja pada periode 2021 dan 2022 telah mengikuti perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Permendagri No 90 Tahun 2019.

Review pada Renja n-2 (2020) melihat pada capaian kinerja outcome dan output kegiatan yang sudah ditetapkan berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2020 dan kemudian diperbaharui melalui perjanjian kinerja perubahan tahun 2020, capain indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel dibawah :

Untuk setiap sasaran Pemerintah Kota Pontianak yang ada diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan di atas, tingkat pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah  
s/d Tahun 2020 Kota Pontianak

OPD : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak  
Urusan : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.02.2.02.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan ATK, dan Keperluan Kantor Lainnya	100%		100%	75%	75		75%	75%
2.02.2.02.01.00.01.001	Gaji dan Tunjangan PNS	Terpenuhinya gaji dan tunjangan PNS	60		12	9	75		9	15%
2.02.2.02.01.00.01.004	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	60		12	9	75		9	15%
2.02.2.02.01.00.01.005	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan kebutuhan air dan listrik	60		12	9	75		9	15%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.02.2.02.01.00.01.006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik / penerangan untuk kantor	60		12	9	75		9	15%
2.02.2.02.01.00.01.007	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah pemenuhan alat dan bahan pembersih	60		12	9	75		9	15%
2.02.2.02.01.00.01.008	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang terpenuhi	60		12	9	75		9	15%
2.02.2.02.01.00.01.009	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah ketersediaan cetakan	60		12	9	75		9	15%
2.02.2.02.01.00.01.011	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	60		12	9	75		9	15%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.02.2.02.01.00.01.012	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah pemenuhan makan dan minum rapat dan tamu	60		12	9	75		9	15%
2.02.2.02.01.00.01.014	Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran	Jumlah pemenuhan jasa teknis administrasi perkantoran	60		12	9	75		9	15%
2.02.2.02.01.00.01.018	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya honor pengelola keuangan	60		12	9	75		9	15%
2.02.2.02.01.00.01.354	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah pemenuhan Perjalanan dinas dalam dan luar daerah	60		12	9	75		9	15%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.02.2.02.01.00.01.445	Sosialisasi Penyelenggaraan Pembangunan di Kota Pontianak	jumlah Kegiatan pameran OPD	5		1	0	0		0	0%
2.02.2.02.01.00.02	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan perlengkapan kantor	100%		100%	75%	75		1	75%
2.02.2.02.01.00.02.062	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah penyediaan perlengkapan gedung kantor	60		10	6	60		6	10%
2.02.2.02.01.00.02.206	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan rutin dan berkala peralatan gedung kantor	60		12	9	75		9	15%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.02.2.02.01.00.02.207	Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemenuhan pembayaran pajak kendaraan dinas	290		58	45	77,5862069		45	16%
2.02.2.02.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%		100%	0%	0		0	0%
2.02.2.02.01.00.04.001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang mengikuti bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10		2	0	0		0	0%
2.02.2.02.01.00.06	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Persentase penyelesaian dokumen capaian kinerja	100%		100%	0,5	50		1	50%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.02.2.02.01.00.06.001	Penyusunan Rencana Kerja	Jumlah dokumen Renja, RKA, DPA dan DPPA	20		4	1	25		1	5%
2.02.2.02.01.00.06.006	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah dokumen LPPD dan LAKIP	10		2	2	100		2	20%
2.02.2.02.01.00.06.073	Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	penyusunan dokumen anjab, ABK dan Evajab	15		3	3	100		3	20%
2.02.2.02.01.00.07	Program peningkatan disiplin dan kinerja aparatur	Persentase pakaian dinas pegawai terpenuhi	100%		100%	100%	100		1	100%



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.02.2.02.01.00.07.006	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS	310		62	62	100		62	20%
2.02.2.02.01.00.08	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	Persentase tersusunnya dokumen laporan keuangan tepat waktu	100%		100%	50%	50		1	50%
2.02.2.02.01.00.08.001	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan	20		4	2	50		2	10%
2.02.2.02.01.00.10	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase tersusunnya dokumen Profil OPD / Updating data Profil OPD	100%		100%	0%	0		0	0%
2.02.2.02.01.00.10.001	Penyusunan Data dan Profil OPD	Jumlah dokumen profil OPD	5		1	0	0		0	0%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.02.2.02.01.00.12	Program Peningkatan Sarana Prasarana Peralatan dan Gedung Kantor	Persentgase peningkatan sarana prasarana gedung kantor	100%		100%	75%	75		1	75%
2.02.2.02.01.00.12.001	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional	60		12	9	75		9	15%
2.02.2.02.01.00.16	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak	a) Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	100%		100%	60%	60		60%	60%
		b) Presentase Forum Anak Daerah yang Aktif	100%		100%	80%	80		80%	80%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.02.2.02.01.00.16.002	Penanganan Kasus KDRT Anak di Kota Pontianak	jumlah anak korban kekerasan yang didampingi	75		15	72	480		72	96%
2.02.2.02.01.00.16.003	Pengembangan Kota Layak Anak	jumlah sekolah yang diberikan sosialisasi tentang kota layak anak	60		12	12	100		12	20%
2.02.2.02.01.00.16.004	Peringatan Hari Anak Nasional, Forum Anak Daerah (FAD) dan Forum Anak Indonesia (FAI)	(1) Jumlah kegiatan peringatan hari anak nasional	5		1	1	100		1	20%
		(2) Jumlah forum anak yang mendapatkan fasilitasi	180		36	36	100		36	20%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.02.2.02.01.00.16.006	Kampanye Perlindungan Anak	jumlah kegiatan Kampanye Perlindungan Anak	10		2	2	100		2	20%
2.02.2.02.01.00.16.007	Peningkatan Kapasitas SDM Kader Pendamping Anak	jumlah Kader yang mengikuti Peningkatan Kapasitas SDM	250		50	50	100		50	20%
2.02.2.02.01.00.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	a) Persentase Kelompok Perempuan Kepala Keluarga yang Mendapatkan Pembinaan Keterampilan dan Keahlian	100%		100%	80%	80		80%	80%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		b) Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	100%		100%	80%	80		80%	80%
2.02.2.02.01.00.17.001	Pembinaan Dalam Rangka Hari-Hari Besar Kewanitaan (Hari Kartini dan Hari IBU)	Jumlah kegiatan peringatan hari wanita	10		2	1	50		1	10%
2.02.2.02.01.00.17.003	Pembinaan Terhadap Keterampilan Perempuan	Jumlah kegiatan pembinaan keterampilan perempuan	30		6	0	0		0	0%
2.02.2.02.01.00.17.004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Shelter dan Operasional	penyediaan rumah aman untuk korban kekerasan	60		12	9	75		9	15%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.02.2.02.01.00.17.007	Monitoring dan Evaluasi Pokja Penanganan Kasus Trafficking dan Korban KDRT Perempuan dan Anak	Jumlah Pokja dan Gugus Tugas KDRT yang aktif	180		36	18	50		18	10%
2.02.2.02.01.00.17.008	Sosialisasi Pembentukan Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)	Jumlah forum PUSPA yang terbentuk	1		1	1	100		1	100%
2.02.2.02.01.00.17.009	Pengumpulan basis data perempuan dan anak kota pontianak	Jumlah ketersediaan data perempuan dan anak	10		2	0	0		0	0%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.02.2.02.01.00.18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase kelembagaan PUG yang aktif	100%		100%	100%	100		100%	100%
2.02.2.02.01.00.18.001	Pembinaan Pengarusutamaan Gender	jumlah OPD yang dilatih PPRG	160		32	0	0		0	0%
JUMLAH			2617	0	523	449,5	85,95			
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA							85,95			

OPD : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak

Urusan : Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA									
2.08.2.02.01.00.19	Program Keluarga Berencana	a) Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang ikut ber-KB Aktif	70,67%		100%	75%	75%		75%	106,13%
		b) Persentase pemenuhan kebutuhan sarana, alat dan obat kontrasepsi	100%						0%	0,00%



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.08.2.02.01.00.19.001	Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan KB	Jumlah peserta MOW dalam pelayanan MOW gratis untuk masyarakat kurang mampu	200		40	30	75%		30	15,00%
2.08.2.02.01.00.19.002	Pengadaan Sarana Pelayanan Keluarga Berencana (DAK Fisik)	Jumlah pembangunan / pengadaan sarana pelayanan dan penyuluhan KB	40		11	4	36%		4	10,00%
2.08.2.02.01.00.19.004	Operasional Pelayanan Keluarga Berencana (BOKB/DAK Non Fisik)	Jumlah pemenuhan Operational Balai Penyuluhan KB	60		12	9	75%		9	15,00%
2.08.2.02.01.00.20	Program Keluarga Sejahtera	a) Prosentase jumlah PUS anggota UPPKS yang ber KB	87,17%		87,17%	0	0%		0%	0,00%
		b) Prosentase cakupan anggota BKB berkb	82,25%		82,25%	0	0%		0%	0,00%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		c) Persentase kelompok Caturbina KB yang mendapatkan pendampingan	100%		100%	0	0%		0%	0,00%
2.08.2.02.01.00.20.001	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Peserta aktif dalam pembinaan kelompok UPPKS	500		100	25	25%		25	5,00%
2.08.2.02.01.00.20.002	Pembinaan Ketahanan Remaja	Jumlah peserta aktif saka kencana dan PIK R / M	250		50	15	30%		15	6,00%
2.08.2.02.01.00.20.003	Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Tribina (BKB,BKR,BKL)	Jumlah Kelompok Tribina (BKB,BKR,BKL) yang mendapatkan pembinaan	620		124	50	40%		50	8,06%
2.08.2.02.01.00.21	Program Penyuluhan dan Penggerakan	a) Persentase pencapaian peserta KB baru	78,05%		78,05%	0	0%		0%	0,00%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		b) Presentase Penggunaan MKJP	26,9%		26,9%	0	0%		0%	0,00%
2.08.2.02.01.00.21.001	Promosi Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Program Pelayan KB	(1) Jumlah Promosi advokasi KKBPK	60		12	9	75%		9	15,00%
		(2) Promosi Pencanaan KB Kes	5		1		0%		0	0,00%
2.08.2.02.01.00.21.002	Peningkatan Komunikasi Informasi dan Edukasi KKBPK (BOKB/DAK Non Fisik)	Jumlah kampung KB yang mendapatkan dana operasional kampung KB	30		6	5	83%		5	16,67%
2.08.2.02.01.00.22	Program Perencanaan Pengendalian Penduduk	a) Persentase data dan informasi keluarga yang diupdate	100%		100%	75%	75%		75%	75,00%
		b) Presentase cakupan unmet need	13,55%		13,55%	0	0%		0%	0,00%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.08.2.02.01.00.22.001	Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk	Jumlah kegiatan rakor terkait kebijakan pengendalian penduduk	15		3	0	0%		0	0,00%
2.08.2.02.01.00.22.002	Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan	jumlah data keluarga yang datanya diupdate / dimutakhirkan	5		1	0	0%		0	0,00%
2.08.2.02.01.00.22.003	Monitoring dan Evaluasi Data Unmet Need	Jumlah Evaluasi Data Unmet Need	30		6	0	0%		0	0,00%
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM			1815	0	366					

OPD : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak

Urusan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Tingkat Realisasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	13=11/6x100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT									
2.07.2.02.01.00.23	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan	Persentase Partisipasi LPM dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	100%		100%	75%	75		75%	75%
2.07.2.02.01.00.23.001	Bulan Bhakti Gotong Royong	Jumlah terlaksananya kegiatan BBGRM	5		1	0	0		0	0%
2.07.2.02.01.00.23.002	Lomba Pembangunan Kelurahan	jumlah kelurahan yang dibina	5		1	1	100		1	20%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Tingkat Realisasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	13=11/6x100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.07.2.02.01.00.24	Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	jumlah alat TTG yang dihasilkan	10		2	0	0		0%	0%
2.07.2.02.01.00.24.001	Lomba Cipta Karya Teknologi Tepat Guna (TTG)	jumlah peserta yang mengikuti lomba TTG	150		30	0	0		0	0%
2.07.2.02.01.00.24.002	Pusat Pelayanan Teknologi (POSYANTEK)	Jumlah Posyantek / Kecamatan	10		2	0	0		0	0%
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM			170	0	34	1	2,94			

Dari tabel diatas dapat terlihat hampir semua program / kegiatan tidak dapat memenuhi target seperti yang telah ditetapkan sebelumnya, hal ini dikarenakan, seperti kita ketahui pada tahun 2020 ini terjadi wabah pandemi dunia yang berdampak pada semua sektor kehidupan. Akibatnya semua kegiatan tidak bisa berjalan secara normal seperti biasanya, karena pemerintah melakukan pembatasan sosial dan melarang aktifitas yang mengumpulkan banyak orang, sehingga banyak kegiatan pada DP2KBP3A Kota Pontianak tidak dapat dilaksanakan. Dan dari segi keuangan terjadi refocusing anggaran, beberapa kegiatan yang mengumpulkan banyak orang dipindahkan untuk penanganan dan penanggulangan yang terdampak oleh pandemi COVID - 19.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Dari table 2.2 dibawah dapat terlihat bahwa untuk Indikator Kinerja Persentase Laju Pertumbuhan Kota Pontianak ditargetkan sebesar 1,7% dan terealisasi sebesar 1,7% dibandingkan dengan target Jangka Menengah dari kementerian terkait yaitu BKKBN sebesar 1,21% memang masih sangat jauh tertinggal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu masih tingginya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) dikota Pontianak sampai dengan semester II yaitu sebesar 12,47%, jauh dibawah target nasional sebesar 5%.

Langkah – langkah kedepan yang akan diambil untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan penjangkaran akseptor KB PUS dan unmet need melalui berbagai metode promosi KB baik melalui media elektronik, jejaring media sosial dan kegiatan pencanangan KB serta penyediaan alat kontrasepsi bagi masyarakat miskin.

Analisis Penyebab dan Solusi mengatasi masalah yang diuraikan adalah Indikator Kinerja Utama Persentase Laju Pertumbuhan Kota Pontianak terealisasi sebesar 1,7% dibandingkan dengan target Jangka Menengah dari kementerian terkait yaitu BKKBN sebesar 1,21% memang masih sangat jauh tertinggal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor:

- a) Salah satunya yaitu masih tingginya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) di kota Pontianak selama tahun terakhir rata-rata sebesar 13%, jauh dibawah target nasional sebesar 5%.
- b) kurangnya kesadaran masyarakat dalam ber KB
- c) masih banyak PUS yang menggunakan ALKON Jangka pendek

solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut diatas yaitu :

- a) mengencarkan penjangkaran dan melakukan advokasi dan promosi lewat PLKB dan kelompok Tribina KB
- b) Melakukan promosi yang efektif melalui media cetak dan elektronik serta promosi program KB melalui kampung-kampung KB yang telah terbentuk
- c) Memaksimalkan peran kader dan PLKB dalam melakukan penjangkaran PUS dan melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan MKJP

Pada Indikator Kinerja Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan antara periode 2017, 2018 dan 2019 memiliki capaian yang sama yaitu 100%. Capaian ini sesuai dengan target capaian yang ada di Renstra OPD yaitu pada akhir periode Renstra tahun 2019 dengan target 100%. Tercapainya indikator ini dikarenakan, setiap kasus kekerasan yang masuk akan langsung mendapatkan pendampingan oleh DP2KBP3 Kota Pontianak, khususnya oleh Bidang PP PA yang dalam penangannya melibatkan seluruh



stackholder terkait, seperti Kepolisian, Kecamatan, Kelurahan, Kader Pendamping Anak, Psikolog dan lain sebagainya.

Indikator Kinerja Penurunan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak belum dapat mencapai target. Pada tahun 2017 kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Pontianak berada pada angka 27 kasus, pada tahun 2018 sempat mengalami penurunan menjadi 12 kasus, dan di tahun 2019 mengalami lonjakan yang signifikan di angka 89 kasus, sehingga target yang telah ditetapkan pada tahun 2019 ini yaitu penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Pontianak sebanyak 15 kasus tidak terpenuhi. Belum naik secara signifikan atau masih di bawah target yang ditetapkan dikarenakan aktifnya para stackholder dalam mengkampanyekan bahayanya dan stop tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak ternyata memotivasi dan menambah pengetahuan korban dan kerabat korban untuk melaporkan setiap kasus kekerasan yang ada kepada DP2KBP3A Kota Pontianak.

Indikator Kinerja Utama Persentase OPD yang melaksanakan PPRG dalam tiga tahun terakhir (2017, 2018 dan 2019) dapat tercapai 100%. Karena OPD yang ada di kota Pontianak tiap tahunnya diberikan materi pelatihan dan penyegaran tentang Penganggaran yang Responsif Gender. Sehingga pelaksanaan PPRG di tiap OPD telah berjalan 100%.

- 1) Faktor penghambat pencapaian
  - a) Masih terbatasnya jumlah SDM yang dimiliki
  - b) Sulitnya mengumpulkan basis data gender dan anak, karena data dimiliki oleh lintas sektoral

- c) Masih ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak dilaporkan dari korban kekerasan kepada DP2KBP3A Kota Pontianak
  - d) Belum tersedianya informasi untuk call center pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
- 2) Jelaskan langkah yang akan dilakukan kedepan untuk pencapaian target IKU
- a) Memaksimalkan peran kader pendamping anak yang ada di setiap kelurahan sebagai ujung tombang dalam mengidentifikasi dan memitigasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
  - b) Lebih menggalakan lagi sosialisasi perlindungan terhadap perempuan dan anak, melalui kegiatan Kampanye Perlindungan Anak, melalui forum PUSPA, Forum Anak Daerah dan kegiatan sosialisasi yang langsung dilakukan di sekolah dan keluarahan
  - c) Membuat Call Center pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

**Error! Reference source not found. 2.2**  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DP2KBP3A  
Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024

3

NO	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				1	2	3	4	5	2020	2021	2022	2023	
1	TFR (Angka Kelahiran Total)			2,17	2,39	2,21	2,19	2,1			2,21	2,19	
2	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)			546	549	400	350	325			400	350	
3	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)			70,23%	70,48%	70,52%	70,61%	70,72%			70,52%	70,61%	
4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)			12,14%	12,47%	8%	7,70%	7,40%			8%	7,70%	
5	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun			0%	19%	20,9%	21,0%	21,0%			20,9%	21,0%	
6	Persentase Baduta Stunting			0	24,50%	24%	22%	19%			24%	22%	
7	Persentase keterlibatan LPM dalam pembangunan Kelurahan			0	55%	60%	75%	90%			60%	75%	

NO	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				1	2	3	4	5	2020	2021	2022	2023	
8	Tingkat capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)			Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya			Madya	Madya	
9	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)			0,0037	0,0038	0,0036	0,0033	0,0031			0,0036	0,0033	
	Persentase keterlibatan stackholder dalam pemutakhiran data Gender dan Anak			60%	65%	75%	90%	100%			75%	90%	
	Persentase Forum Anak Daerah Aktif			100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten / kota			100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	

### 3.1 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Beberapa faktor yang menyebabkan belum semua target-target indikator kinerja sasaran strategis (*outcome*) dan target kinerja kegiatan (*output*) yang direncanakan dapat direalisasikan belum optimal disebabkan oleh beberapa hambatan dan kendala, antara lain :

- a. Belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang baik dan memadai sehingga data dan informasi yang digunakan untuk merencanakan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan tidak tercapai secara optimal.
- b. Kapasitas kelembagaan dan aparatur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang masih rendah, keterbatasan sumberdaya, baik sumber daya keuangan maupun sumber daya manusia sehingga pelayanan prima belum menjangkau dan memberikan kepuasan kepada seluruh lapisan masyarakat.
- c. Koordinasi, sinkronisasi dan integrasi baik di internal Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan KB maupun antar SKPD terkait serta dengan pihak Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan yang masih perlu ditingkatkan lagi secara terpadu dan berkelanjutan.
- d. Kurangnya peran dan sinergitas diantara para pihak (stakeholder), baik sinergitas antar sektor maupun antar tingkat pemerintahan mengakibatkan terjadinya tumpang tindih dan/atau kesenjangan kegiatan sehingga tidak efektif dan efisien. Hal ini juga berakibat pada sulitnya menciptakan komitmen bersama dalam mengembangkan potensi swadaya secara optimal yang bermuara pada kurang optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- e. Lemahnya kekuatan modal sosial (*social capital*) seperti kepercayaan, kebersamaan, partisipasi, jejaring masyarakat yang menyebabkan terhambatnya pengembangan potensi masyarakat, kurangnya kreativitas atau

swadaya masyarakat dalam memberikan ide-ide atau gagasan-gagasan baru dalam bidang inovasi pembangunan rendahnya posisi tawar masyarakat, dan tidak efektifnya berbagai program dan kegiatan yang direncanakan.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana mengupayakan berbagai langkah kebijakan yaitu :

- a. Peningkatan hubungan kerjasama kemitraan dengan berbagai instansi terkait dalam wilayah kerja seperti Kecamatan, Kelurahan, SKPD, BKKBN, Kepolisian, TNI serta komponen masyarakat lainnya seperti tokoh masyarakat, pemuka agama, LSM, LPM, Pekerja Sosial, Pihak Swasta, PKK, LPM, BKM, dan lainnya.
- b. Membangun sistem perencanaan kinerja yang lebih terarah dan difahami oleh semua pemangku program dan kegiatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan KB, sehingga pada saatnya pelaksanaan dan pelaporan atas terlaksananya program dan kegiatan dapat disampaikan secara akurat dan akuntabel.
- c. Peningkatan partisipasi stakeholders dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana.
- d. Perluasan pembinaan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera melalui berbagai kebijakan dan strategi yang bersifat terpadu dan terkoordinas dengan berbagai stakeholder;
- e. Pembenahan internal organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka peningkatan kesadaran aparatur terhadap tugas dan fungsi pelayanan umum sehingga dapat meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan masyarakat secara efisien dan efektif.

### 3.2 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kota Pontianak RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari system perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai pemangku kepentingan. Penyusunan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 telah disusun melalui proses pendekatan perencanaan pembangunan yaitu politik, teknokratik, partisipatif dan perencanaan yang disusun berdasarkan masukan-masukan dari atas – bawah serta bawah-atas (topdown – bottom up). Namun demikian tentunya masih terdapat berbagai hal yang masih perlu ditindaklanjuti, disamping adanya hal-hal baru yang berkembang selama periode berikutnya, untuk itulah Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024 untuk mengasihkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah efektif, efisien sehingga mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Berikut tabel rancangan awal RKPD 2022 :

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022 Kota Pontianak

Tabel 3.2  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPd Tahun 2022  
Kota Pontianak

No	Rancangan Awal RKPd (Mengacu pada Rancangan Renstra OPD 2020 -2024)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		TFR (Angka Kelahiran Total)	2,21	277.176.390	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		TFR (Angka Kelahiran Total)	2,21	294.167.796	
			Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	400				Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	400		
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Persentase keterlibatan stakeholder dalam pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	80%	155.116.390	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Persentase keterlibatan stakeholder dalam pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	80%	115.207.276	
	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan,	Kota Pontianak	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif	50	53.446.800	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan,	Kota Pontianak	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif	50	12.312.043	

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak 2022



No	Rancangan Awal RKPD (Mengacu pada Rancangan Renstra OPD 2020 -2024)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)		dalam pengelolaan program KKBPK			Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)		dalam pengelolaan program KKBPK			
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	1	41.014.600	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	1	67.592.503	
	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Kota Pontianak	Jumlah data keluarga yang dimutakhirkan	1	60.654.990	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Kota Pontianak	Jumlah data keluarga yang dimutakhirkan	1	35.302.730	
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		persentase stachloder yang terlibat dalam Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	80%	122.060.000	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		persentase stachloder yang terlibat dalam Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	80%	178.960.520	
	Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Kota Pontianak	Jumlah rumah data yang dibentuk	2	78.060.000	Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Kota Pontianak	Jumlah rumah data yang dibentuk	2	30.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD (Mengacu pada Rancangan Renstra OPD 2020 -2024)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kota Pontianak	Jumlah data dan informasi keluarga yang dikelola	1	22.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kota Pontianak	Jumlah data dan informasi keluarga yang dikelola	1	112.423.661	
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kota Pontianak	Jumlah data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang dikelola	30	22.000.000	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kota Pontianak	Jumlah data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang dikelola	30	36.536.859	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	70,52%	2.850.876.019	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	70,52%	3.511.031.033	
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8%				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8%		
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	86,20%	1.333.587.600	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	86,20%	2.009.770.863	
			Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	28,30%				Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	28,30%		
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kota Pontianak	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	1	75.587.600	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kota Pontianak	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	1	225.224.415	

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak 2022

No	Rancangan Awal RKPD (Mengacu pada Rancangan Renstra OPD 2020 -2024)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Kota Pontianak	Jumlah Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik	4	88.000.000	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Kota Pontianak	Jumlah Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik	4	45.000.000	
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kota Pontianak	Jumlah Pelaksanaan Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	48	770.000.000	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kota Pontianak	Jumlah Pelaksanaan Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	48	445.686.000	
	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	Kota Pontianak	Jumlah Balai Penyuluhan KB yang mendapatkan dana operasional dan sarana	6	400.000.000	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	Kota Pontianak	Jumlah Balai Penyuluhan KB yang mendapatkan dana operasional dan sarana	6	1.293.860.448	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100%	1.517.288.419	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100%	1.501.260.170	
			Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	45,12%				Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	45,12%		

No	Rancangan Awal RKP (Mengacu pada Rancangan Renstra OPD 2020 -2024)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Pontianak	Jumlah klinik KB swasta dan Pemerintah yang mendapatkan bantuan Obat-Obatan Habis Pakai Penunjang Pelayanan KB	100	31.346.019	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Pontianak	Jumlah klinik KB swasta dan Pemerintah yang mendapatkan bantuan Obat-Obatan Habis Pakai Penunjang Pelayanan KB	100	20.000.000	
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Pontianak	Jumlah PUS yang menggunakan MKJP		160.120.400	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Pontianak	Jumlah PUS yang menggunakan MKJP		90.984.000	
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Pontianak	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan KB	9	1.163.088.000	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Pontianak	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan KB	9	1.239.363.000	
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Pontianak	Jumlah Peserta Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	60	107.734.000	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Pontianak	Jumlah Peserta Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	60	111.469.435	
	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kota Pontianak	Jumlah Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang mendapatkan peningkatan kompetensi	60	55.000.000	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kota Pontianak	Jumlah Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang mendapatkan peningkatan kompetensi	60	39.443.735	

No	Rancangan Awal RKP (Mengacu pada Rancangan Renstra OPD 2020 -2024)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	20,9%	329.142.704	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	20,9%	1.113.488.067	
			Persentase Baduta Stunting	24%				Persentase Baduta Stunting	24%		
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	60,32	307.142.704	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	60,32	1.088.488.067	
	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan	Kota Pontianak	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK/R, UPPKS) yang dibentuk	10	41.689.890	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan	Kota Pontianak	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK/R, UPPKS) yang dibentuk	10	35.048.393	

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak 2022

No	Rancangan Awal RKPD (Mengacu pada Rancangan Renstra OPD 2020 -2024)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Ekonomi Keluarga)					Ekonomi Keluarga)					
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Pontianak	Jumlah Penyediaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	6	55.000.000	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Pontianak	Jumlah Penyediaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	6	47.969.567	
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Pontianak	Jumlah peserta aktif yang mendapatkan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	50	85.953.780	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Pontianak	Jumlah peserta aktif yang mendapatkan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	50	70.325.940	

No	Rancangan Awal RKPD (Mengacu pada Rancangan Renstra OPD 2020 -2024)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Pontianak	Jumlah Kader yang mendapatkan Orientasi/Pelatihan Teknis Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	105	33.000.000	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Pontianak	Jumlah Kader yang mendapatkan Orientasi/Pelatihan Teknis Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	105	30.294.000	
	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Pontianak	Tersedianya biaya operasional bagi pengelola dan kader Poktan	50	22.000.000	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Pontianak	Tersedianya biaya operasional bagi pengelola dan kader Poktan	50	30.000.000	
	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Pontianak	Tersedianya biaya operasional kelompok untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kelompok	12	25.499.034	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Pontianak	Tersedianya biaya operasional kelompok untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kelompok	12	30.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD (Mengacu pada Rancangan Renstra OPD 2020 -2024)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Keluarga/UPPKS)					Keluarga/UPPKS)					
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Pontianak	Jumlah kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	3 kegiatan	22.000.000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Pontianak	Jumlah kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	3 kegiatan	101.850.167	
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kota Pontianak	Jumlah kegiatan Promosi dan Sosialisasi Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga	3 kegiatan	22.000.000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kota Pontianak	Jumlah kegiatan Promosi dan Sosialisasi Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga	3 kegiatan	743.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD (Mengacu pada Rancangan Renstra OPD 2020 -2024)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase keterlibatan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	65%	22.000.000	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase keterlibatan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	65%	25.000.000	
	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kota Pontianak	Jumlah Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1	22.000.000	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kota Pontianak	Jumlah Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1	25.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Persentase keterlibatan LPM dalam pembangunan Kelurahan	60%	468.039.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Persentase keterlibatan LPM dalam pembangunan Kelurahan	60%	306.524.202	

No	Rancangan Awal RKPD (Mengacu pada Rancangan Renstra OPD 2020 -2024)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		persentase lembaga kemasyarakatan yang terlibat aktif dalam pemberdayaan masyarakat kelurahan	60%	468.039.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		persentase lembaga kemasyarakatan yang terlibat aktif dalam pemberdayaan masyarakat kelurahan	60%	306.524.202	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Pontianak	Jumlah kelurahan yang dibina dalam lomba kelurahan	1	149.844.100	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Pontianak	Jumlah kelurahan yang dibina dalam lomba kelurahan	1	165.330.372	

No	Rancangan Awal RKP (Mengacu pada Rancangan Renstra OPD 2020 -2024)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kota Pontianak	jumlah peserta yang mengikuti lomba TTG	40	118.194.900	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kota Pontianak	jumlah peserta yang mengikuti lomba TTG	40	87.337.830	
			Jumlah Posyantek yang terbentuk	2	100.000.000			Jumlah Posyantek yang terbentuk	2		
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kota Pontianak	Jumlah stackholder yang terlibat dalam kegiatan BBGRM	38	100.000.000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kota Pontianak	Jumlah stackholder yang terlibat dalam kegiatan BBGRM	38	53.856.000	
	<b>PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>		<b>Tingkat capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)</b>	<b>Madya</b>	<b>130.149.929</b>	<b>PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>		<b>Tingkat capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)</b>	<b>Madya</b>	<b>196.792.473</b>	
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	11,56%	39.844.200	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	11,56%	83.564.473	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kota Pontianak	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	60	17.844.200	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kota Pontianak	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	60	25.000.000	
	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termssuk PPRG	Kota Pontianak	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	20	22.000.000	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termssuk PPRG	Kota Pontianak	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	20	58.564.473	

No	Rancangan Awal RKPD (Mengacu pada Rancangan Renstra OPD 2020 -2024)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten/Kota		persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	100,00%	90.305.729	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten/Kota		persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	100,00%	93.228.000	
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Pontianak	jumlah peserta aktif dalam sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	800 peserta	90.305.729	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Pontianak	jumlah peserta aktif dalam sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	800 peserta	93.228.000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	2	-	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	2	20.000.000	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	3	71.482.400	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	3	20.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD (Mengacu pada Rancangan Renstra OPD 2020 -2024)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,0036	252.864.550	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,0036	641.021.460	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	43.895.670	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	398.643.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah rakor dan sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	5	9.129.780	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah rakor dan sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	5	46.920.000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi		34.765.890	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi		351.723.000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh	3	208.968.880	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh	3	242.378.460	

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak 2022

No	Rancangan Awal RKPD (Mengacu pada Rancangan Renstra OPD 2020 -2024)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		pemerintah kabupaten/kota			Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		pemerintah kabupaten/kota			
			Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan	20%				Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan	20%		
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan rumah aman /shelter untuk perempuan dan anak korban kekerasan	12	184.678.680	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan rumah aman /shelter untuk perempuan dan anak korban kekerasan	12	227.378.460	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	60	24.290.200	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	60	15.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Persentase keterlibatan stakeholder dalam pemutakhiran data Gender dan Anak	75%	14.291.200	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Persentase keterlibatan stakeholder dalam pemutakhiran data Gender dan Anak	75%	9.690.000	

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak 2022

No	Rancangan Awal RKPD (Mengacu pada Rancangan Renstra OPD 2020 -2024)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota		Persentase data gender dan anak yang tersedia dan dimutakhirkan	100%	14.291.200	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota		Persentase data gender dan anak yang tersedia dan dimutakhirkan	100%	9.690.000	
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah data Gender dan Anak yang tersedia	2	14.291.200	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah data Gender dan Anak yang tersedia	2	9.690.000	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase Forum Anak Daerah Aktif	100%	212.948.010	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase Forum Anak Daerah Aktif	100%	400.881.565	
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	35%	25.669.325	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	35%	373.772.380	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan	Kota Pontianak	Jumlah Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	20	25.669.325	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan	Kota Pontianak	Jumlah Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	20	373.772.380	

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak 2022

No	Rancangan Awal RKPD (Mengacu pada Rancangan Renstra OPD 2020 -2024)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)			
		Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota						
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang mendapatkan penguatan dan pengembangan	20%	187.278.685		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang mendapatkan penguatan dan pengembangan	20%	27.109.185	
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	5	76.940.160		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	5	12.109.185	



No	Rancangan Awal RKPD (Mengacu pada Rancangan Renstra OPD 2020 -2024)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	1	110.338.525	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	1	15.000.000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten / kota	100%	101.171.840	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten / kota	100%	86.212.022	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%	40.506.290	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%	39.183.071	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah kasus anak mendapat mendampingan	70	40.506.290	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah kasus anak mendapat mendampingan	70	39.183.071	

No	Rancangan Awal RKPD (Mengacu pada Rancangan Renstra OPD 2020 -2024)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan penguatan dan pengembangan	20%	60.665.550	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan penguatan dan pengembangan	20%	47.028.951	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah peserta Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	50 peserta	60.665.550	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah peserta Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	50 peserta	47.028.951	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	95%	6.887.657.958	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	95%	6.768.460.468	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	24 dokumen	19.851.316	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	24 dokumen	52.322.195	

No	Rancangan Awal RKPD (Mengacu pada Rancangan Renstra OPD 2020 -2024)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	14 dokumen	5.268.450	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	14 dokumen	32.817.240	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pontianak	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	6 laporan	13.739.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pontianak	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	6 laporan	10.610.810	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 laporan	843.866	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 laporan	8.894.145	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	6.072.745.570	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	5.880.050.326	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	5.685.039.790	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	5.514.696.883	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pontianak	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 bulan	382.023.279	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pontianak	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 bulan	347.238.396	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Pontianak	Jangka waktu Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 bulan	5.682.501	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Pontianak	Jangka waktu Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 bulan	18.115.047	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	31 ASN	56.671.560	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	31 ASN	54.712.800	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Kota Pontianak	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	64 stel	40.336.560	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Kota Pontianak	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	64 stel	41.452.800	

No	Rancangan Awal RKPD (Mengacu pada Rancangan Renstra OPD 2020 -2024)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)			
			Kelengkapannya					Kelengkapannya					
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pontianak	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	2 ASN	16.335.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pontianak	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	2 ASN	13.260.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	447.161.542	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	449.756.851	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	5.445.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	5.043.793	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100 unit	70.567.200	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100 unit	61.491.142	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pontianak	Jumlah unit peralatan rumah tangga yang disediakan	100 unit	13.068.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pontianak	Jumlah unit peralatan rumah tangga yang disediakan	100 unit	12.221.040	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	56.469.006	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	54.388.796	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	3.920.400	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	3.672.000	

No	Rancangan Awal RKP (Mengacu pada Rancangan Renstra OPD 2020 -2024)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pontianak	Jumlah tamu yang difasilitasi	400 orang	58.669.875	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pontianak	Jumlah tamu yang difasilitasi	400 orang	24.990.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pontianak	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 bulan	239.022.061	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pontianak	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 bulan	287.950.080	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 unit	66.570.570	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 unit	32.289.222	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	15 unit	66.570.570	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	15 unit	32.289.222	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	33.864.600	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	35.557.200	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	10.560.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	11.016.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	12 bulan	23.304.600	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	12 bulan	24.541.200	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	135 unit	190.792.800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	135 unit	263.771.874	

No	Rancangan Awal RKPD (Mengacu pada Rancangan Renstra OPD 2020 -2024)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pontianak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	59 unit	127.413.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pontianak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	59 unit	220.727.874	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	65 unit	63.379.800	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	65 unit	43.044.000	
					11.524.317.600					13.328.269.087	

### 3.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat dapat diutaran secara langsung secara bottom up mulai dari kelurahan sampai kecamatan menggunakan sistem SPIP yang telah berjalan di Pemerintahan Kota Pontianak. Berikut beberapa usulan program kegiatan yang tertampung pada DP2KBP3A Kota Pontianak :

1. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada program ini mengusulkan adanya pembinaan organisasi perempuan untuk meningkatkan peran serta gender dalam pembangunan melalui sosialisasi kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam bentuk program P2W KSS & GSI, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

2. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk masyarakat menghendaki adanya pelayanan alat kontrasepsi gratis dalam pengaturan kelahiran diharapkan adanya jaminan ketersediaan kontrasepsi. Untuk membantu pendewasaan usia perkawinan masyarakat menghendaki suatu wadah yang menangani remaja dalam bentuk kelompok pusat informasi konseling kesehatan reproduksi remaja (PIK-KRR) di desa, karang taruna, sekolah, pesantren, perguruan tinggi diharapkan adanya pelatihan-pelatihan masuk dalam pelayanan propinsi, program pembinaan ketahanan keluarga masyarakat menghendaki adanya wadah yang mengayomi ketahanan keluarga dalam bentuk kelompok bina-bina (BKB, BKL, BKR) pembinaan diharapkan masuk dalam pelayanan propinsi. Dalam hal peningkatan pendapatan kesejahteraan keluarga masyarakat mengharapkan penyertaan modal usaha pada kelompok yang ada di desa yaitu kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) masuk dalam penyertaan modal dari propinsi/ pusat.

## BAB III

## TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

**A** nalisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian/Lembaga tercantum pada tabel berikut ini.

Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.</li> <li>• Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan</li> </ul>
	b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.</li> </ul>		
2	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.</li> <li>• Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A</li> </ul>
	b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.</li> </ul>		



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.</li> </ul>		
3	a. Meningkatkan implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).</li> <li>Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak</li> </ul>
	b. Meningkatkan kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak			
	c. Meningkatkan kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.		
4	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</li> </ul>

### 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh perangkat daerah diuraikan sebagai berikut : "Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Perempuan dan Perlindungan Anak" dengan sasaran :

1. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak
2. Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
3. Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

### 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2022

Adapun rencana program dan kegiatan yang akan diimplementasikan sesuai dengan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak Tahun 2020-2024 yang selaras dengan RPJM Kota Pontianak Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
  - a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
    - 1) Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)
    - 2) Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
    - 3) Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga
  - b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
    - 1) Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain
    - 2) Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
    - 3) Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
2. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
  - a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal

- 1) Advokasi Program KKBPk kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
  - 2) Promosi dan KIE Program KKBPk Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang
  - 3) Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPk melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
  - 4) Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPk
- b. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota
- 1) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
  - 2) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
  - 3) Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
  - 4) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
  - 5) Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
- a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- 1) Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB) ,Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL) ,Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
- 2) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- 3) Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- 4) Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- 5) Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- 6) Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- 7) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- 8) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)

- b. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
  - 1) Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja
- 4. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
  - a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - 1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
    - 2) Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
    - 3) Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- 5. PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
  - a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
    - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
    - 2) Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

- b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
    - 1) Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
  - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
    - 1) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
6. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
- a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
    - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
    - 2) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
  - b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
    - 2) Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
7. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
- a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota

- 1) Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
8. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
    - a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
      - 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
    - b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
      - 1) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
      - 2) Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
9. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
    - a. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
      - 1) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
      - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang

Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah  
Kabupaten/Kota

10. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah



Daerah

- 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Tabel 3.3

## Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DP2KBP3A Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kota Pontianak

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR (Angka Kelahiran Total)		2,21	294.167.796			2,19	300.051.152
		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15- 19)		400				350	
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase keterlibatan stackholder dalam pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk		80%	115.207.276			90%	117.511.422
	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam	Kota Pontianak	50	12.312.043	APBD		55	12.558.283

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak 2022

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	(Program KKBPK)	pengelolaan program KKBPK							
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Kota Pontianak	1	67.592.503	APBD		1	68.944.353
	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah data keluarga yang dimutakhirkan	Kota Pontianak	1	35.302.730	APBD		1	36.008.785
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	persentase stachloder yang terlibat dalam Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		80%	178.960.520			90%	182.539.730
	Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah rumah data yang dibentuk	Kota Pontianak	2	30.000.000	APBD		4	30.600.000
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah data dan informasi keluarga yang dikelola	Kota Pontianak	1	112.423.661	APBD		1	114.672.134
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang dikelola	Kota Pontianak	30	36.536.859	APBD		30	37.267.596

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak 2022

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)		70,52%	3.511.031.033			70,61%	3.581.251.653
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)		8%				7,70%	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)		86,20%	2.009.770.863			100%	2.049.966.280
		Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		28,30%				29,13%	
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Kota Pontianak	1	225.224.415	APBD		1	229.728.903
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Jumlah Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik	Kota Pontianak	4	45.000.000	APBD		4	45.900.000
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Pelaksanan Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kota Pontianak	48	445.686.000	DAK		48	454.599.720

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak 2022

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Lokakarya (Minilok)								
	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai Penyuluhan KB yang mendapatkan dana operasional dan sarana	Kota Pontianak	6	1.293.860.448	APBD & DAK		6	1.319.737.657
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP		100%	1.501.260.170			100%	1.531.285.373
		Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan		45,12%				45,21%	
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah klinik KB swasta dan Pemerintah yang mendapatkan bantuan Obat-Obatan Habis Pakai Penunjang Pelayanan KB	Kota Pontianak	100	20.000.000	APBD		100	20.400.000
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah PUS yang menggunakan MKJP	Kota Pontianak		90.984.000	APBD		#VALUE!	92.803.680
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan KB	Kota Pontianak	9	1.239.363.000	APBD & DAK		8	1.264.150.260

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Peserta Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kota Pontianak	60	111.469.435	APBD		70	113.698.824
	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang mendapatkan peningkatan kompetensi	Kota Pontianak	60	39.443.735	APBD		70	40.232.609
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun		20,9%	1.113.488.067			21,0%	1.135.757.829
		Persentase Baduta Stunting		24%				22%	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		60,32	1.088.488.067			62,44	1.110.257.829
	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK/R, UPPKS) yang dibentuk	Kota Pontianak	10	35.048.393	APBD		10	35.749.361

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak 2022

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Penyediaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Pontianak	6	47.969.567	APBD		6	48.928.958
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah peserta aktif yang mendapatkan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Pontianak	50	70.325.940	APBD		50	71.732.459
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang mendapatkan Orientasi/Pelatihan Teknis Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Pontianak	105	30.294.000	APBD		115	30.899.880
	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tersedianya biaya operasional bagi pengelola dan kader Poktan	Kota Pontianak	50	30.000.000	APBD		60	30.600.000

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tersedianya biaya operasional kelompok untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kelompok	Kota Pontianak	12	30.000.000	APBD		15	30.600.000
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Pontianak	3 kegiatan	101.850.167	APBD		3 kegiatan	103.887.170
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah kegiatan Promosi dan Sosialisasi Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga	Kota Pontianak	3 kegiatan	743.000.000	DAK		3 kegiatan	757.860.000
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase keterlibatan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		65%	25.000.000			68%	25.500.000



No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Pontianak	1	25.000.000	APBD		2	25.500.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase keterlibatan LPM dalam pembangunan Kelurahan		60%	306.524.202			75%	312.654.687
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase lembaga kemasyarakatan yang terlibat aktif dalam pemberdayaan masyarakat kelurahan		60%	306.524.202			75%	312.654.687
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kelurahan yang dibina dalam lomba kelurahan	Kota Pontianak	1	165.330.372	APBD		1	168.636.979
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	jumlah peserta yang mengikuti lomba TTG	Kota Pontianak	40	87.337.830	APBD		50	89.084.587

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Jumlah Posyantek yang terbentuk		2				4	
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah stackholder yang terlibat dalam kegiatan BBGRM	Kota Pontianak	38	53.856.000	APBD		40	54.933.120
	<b>PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Tingkat capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)		Madya	196.792.473			Madya	200.728.322
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ARG pada belanja langsung APBD		11,56%	83.564.473			12,17%	85.235.762
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	Kota Pontianak	60	25.000.000	APBD		60	25.500.000
	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termssuk PPRG	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	Kota Pontianak	20	58.564.473	APBD		20	59.735.762
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	<b>persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi</b>		100,00%	93.228.000			100,00%	95.092.560

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	jumlah peserta aktif dalam sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Kota Pontianak	800 peserta	93.228.000	APBD		800 peserta	95.092.560
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan		2	20.000.000			4	20.400.000
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	Kota Pontianak	3	20.000.000	APBD		4	20.400.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)		0,0036	641.021.460			0,0033	653.841.889
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani		100%	398.643.000			100%	406.615.860
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rakor dan sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Kota Pontianak	5	46.920.000	APBD		6	47.858.400

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Kota Pontianak		351.723.000	DAK		2	358.757.460
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota		3	242.378.460			3	247.226.029
		Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan		20%				35%	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jangka waktu penyediaan rumah aman /shelter untuk perempuan dan anak korban kekerasan	Kota Pontianak	12	227.378.460	APBD		12	231.926.029
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	Kota Pontianak	60	15.000.000	APBD		90	15.300.000
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase keterlibatan stackholder dalam pemutakhiran data Gender		75%	9.690.000			90%	9.883.800

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak 2022

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		dan Anak							
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Persentase data gender dan anak yang tersedia dan dimutakhirkan		100%	9.690.000			100%	9.883.800
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah data Gender dan Anak yang tersedia	Kota Pontianak	2	9.690.000	APBD		2	9.883.800
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Forum Anak Daerah Aktif		100%	400.881.565			100%	408.899.197
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha		35%	373.772.380			50%	381.247.828
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	Kota Pontianak	20	373.772.380	APBD		20	381.247.828
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang mendapatkan penguatan dan		20%	27.109.185			30%	27.651.369

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak 2022

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Kewenangan Kabupaten/Kota	pengembangan							
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Kota Pontianak	5	12.109.185	APBD		6	12.351.369
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	Kota Pontianak	1	15.000.000	APBD		1	15.300.000
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten / kota		100%	86.212.022			100%	87.936.262
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani		100%	39.183.071			100%	39.966.732

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus anak mendapat mendampingan	Kota Pontianak	70	39.183.071	APBD		63	39.966.732
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan penguatan dan pengembangan		20%	47.028.951			30%	47.969.530
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Kota Pontianak	50 peserta	47.028.951	APBD		60 peserta	47.969.530
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan		95%	6.768.460.468			100%	6.903.829.678
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah		24 dokumen	52.322.195			24 dokumen	53.368.639
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Kota Pontianak	14 dokumen	32.817.240	APBD		14 dokumen	33.473.585

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak 2022

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Kota Pontianak	6 laporan	10.610.810	APBD		6 laporan	10.823.026
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Pontianak	4 laporan	8.894.145	APBD		4 laporan	9.072.028
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah		12 bulan	5.880.050.326			12 bulan	5.997.651.333
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kota Pontianak	12 bulan	5.514.696.883	APBD		12 bulan	5.624.990.821
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kota Pontianak	12 bulan	347.238.396	APBD		12 bulan	354.183.164
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jangka waktu Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Pontianak	12 bulan	18.115.047	APBD		12 bulan	18.477.348
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola administrasinya		31 ASN	54.712.800			32 ASN	55.807.056
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kota Pontianak	64 stel	41.452.800	APBD		66 stel	42.281.856
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Kota Pontianak	2 ASN	13.260.000	APBD		2 ASN	13.525.200
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah		12 bulan	449.756.851			12 bulan	458.751.988

**Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak 2022**



No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jangka waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pontianak	12 bulan	5.043.793	APBD		12 bulan	5.144.669
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Pontianak	100 unit	61.491.142	APBD		100 unit	62.720.964
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah unit peralatan rumah tangga yang disediakan	Kota Pontianak	100 unit	12.221.040	APBD		100 unit	12.465.461
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Pontianak	12 bulan	54.388.796	APBD		12 bulan	55.476.572
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Pontianak	12 bulan	3.672.000	APBD		12 bulan	3.745.440
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	Kota Pontianak	400 orang	24.990.000	APBD		400 orang	25.489.800
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Kota Pontianak	12 bulan	287.950.080	APBD		12 bulan	293.709.082
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		12 unit	32.289.222			15 unit	32.935.006
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kota Pontianak	15 unit	32.289.222	APBD		12 unit	32.935.006

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		12 bulan	35.557.200			12 bulan	36.268.344
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	Kota Pontianak	12 bulan	11.016.000	APBD		12 bulan	11.236.320
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	Kota Pontianak	12 bulan	24.541.200	APBD		12 bulan	25.032.024
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara		135 unit	263.771.874			140 unit	269.047.311
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	Kota Pontianak	59 unit	220.727.874	APBD		59 unit	225.142.431
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kota Pontianak	65 unit	43.044.000	APBD		65 unit	43.904.880
	JUMLAH				13.328.269.087				13.594.834.468

## BAB IV PENUTUP

**R**encana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak tahun 2022 ini disusun sebagai pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan mengacu pada pendekatan perencanaan penganggaran yang telah disediakan.

Apabila tersedia anggaran yang memadai maka semua program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan target yang di inginkan akan tercapai demikian sebaliknya seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak akan terlaksana dengan baik sehingga tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk tindak lanjut dalam penyusunan Renja ini selanjutnya kami akan menyusun Program kegiatan dan anggaran dalam bentuk RKA serta Rencana Operasional Kegiatan Tahun 2020.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 ini dibuat dan diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien.